

Kemendag Proyeksikan Nilai Ekspor Nonmigas Tumbuh 4,5% Tahun Ini



KINERJA PERDAGANGAN 2023 & OUT LOOK PERDAGANGAN 2024

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berbincang dengan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga usai memberikan pemaparan Kinerja Perdagangan tahun 2023 dan Out Look Perdagangan tahun 2024, di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (4/1). Mendag Zulkifli menyebut inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,61 persen merupakan angka terendah sepanjang reformasi. Sementara dalam laporan penyelenggaraan TEI 2023, transaksi mencapai USD30,5 miliar atau Rp 427,8 triliun, dengan jumlah pengunjung 38,9 ribu.

Zulkifli Hasan mengatakan, Asia merupakan wilayah yang sangat luas sehingga masih dapat untuk dieksplorasi. Indonesia harus membuat produk-produk yang bernilai tambah seperti hilirisasi. "Andalannya tetap CPO, batu bara, nikel, dan tentu produk-produk manufaktur dan juga produk hasil hutan," ujarnya.

JAKARTA (IM) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan nilai ekspor nonmigas Indonesia pada 2024 tumbuh sebesar 2,5 persen hingga 4,5 persen. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah optimistis dengan perekonomian global 2024 meski terdapat sejumlah tantangan, khususnya harga komoditas dunia.

"Pemerintah akan berupaya untuk mendorong ekspor nonmigas sesuai target 2,5-4,5 persen di 2024 walaupun tantangan harga komoditas dunia masih cukup landai," ujar Zulkifli dalam paparan Outlook 2024 dan Kinerja Kementerian Perdagangan di Jakarta, Kamis (4/1).

Sebagai upaya mewujudkan target ekspor 2024, Kementerian Perdagangan akan mengembangkan pasar baru non tradisional seperti India, Pakistan, Afrika Selatan, Nigeria, Meksiko, dan lainnya.

Kemendag juga akan mengembangkan pasar di wilayah India dan Pakistan. Pada periode Januari-November 2023, nilai ekspor nonmigas India mencapai 18,45 miliar dolar AS.

Dijelaskan Zulkifli, Asia merupakan wilayah yang sangat luas sehingga masih dapat untuk dieksplorasi. Indonesia harus membuat produk-produk yang bernilai tambah seperti hilirisasi. "Andalannya tetap CPO, batu bara, nikel, dan tentu produk-produk manufaktur dan juga

produk hasil hutan," katanya. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia selama Januari-November 2023 sebesar 236,41 miliar, turun 11,83 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan nilai ekspor

kumulatif tersebut disebabkan melemahnya ekspor nonmigas sebesar 12,47 persen dan menurunnya ekspor migas sebesar 0,67 persen. Tiga negara tujuan utama ekspor nonmigas adalah RRT, Amerika dan India.

Kemendag juga menyebutkan nilai impor Indonesia selama Januari-November 2023 mencapai 202,78 miliar dolar AS, turun 6,80 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Kemendag terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Selalu saya menyampaikan di mana-mana impor ditata tapi ekspor dipermudah," ucap Zulkifli.

Pada kesempatan itu Zulkifli menyinggung tentang loka pasar atau plat-

form jual beli lewat media elektronik. Menurutnya dari sektor ini mencapai Rp533 triliun pada 2023. Angka ini meningkat dari transaksi e-commerce sepanjang 2022 sebesar Rp476,3 triliun. "2023 diperkirakan capai Rp533 triliun," kata Zulhas, panggilan akrabnya.

Guna menggenjot transaksi e-commerce di dalam negeri telah diterbitkan aturan baru yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Periklanan Perdagangan dan Pengawasan melalui Sistem Elektronik.

Jadi, dengan aturan itu telah diberlakukan bagaimana kebijakan terkait dengan perdagangan di e-commerce. Salah satu aturannya yakni

harus terpisahnya antara e-commerce dan media sosial, lalu ditentukan juga larangan barang impor yang dijual di bawah US\$100.

Aturan itu dibuat untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha atau UMKM agar tidak kalah saing dengan produk-produk dari luar negeri. "Jadi kemajuan ekonomi digital atau e-commerce jangan sampai merugikan kita. Tapi pemerintah kita adalah negara yang terbuka. Tidak ada melarang larang tapi kita atur. Oleh karena itu e-commerce luar diatur agar tidak rugikan UMKM, tidak rugikan industri dalam negeri itu ada di Permendag 31," jelasnya. • dro

Pertamina Terima Dana Kompensasi BBM Rp132 Triliun

JAKARTA (IM) - PT Pertamina (Persero) menerima pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp 132,44 triliun (termasuk PPN) atau Rp119,31 triliun (tidak termasuk PPN).

Adapun jumlah tersebut terdiri atas pembayaran untuk Dana Kompensasi triwulan I-III 2023 sebesar Rp82,73 triliun, dana tertunggak 2022 sebesar Rp49,14 triliun dan dana tertunggak 2021 sebesar Rp569 miliar.

Dana tersebut merupakan kompensasi selisih harga jual formula dan harga jual eceran di SPBU atas kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Peralite yang nilainya telah di-review oleh Inspektoral Kementerian Keuangan.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Ke-

mentrian BUMN, dan Kementerian ESDM sehingga terlaksana pelunasan dana kompensasi tersebut.

"Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI yang telah mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina sampai dengan triwulan III 2023," kata Nicke, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/1).

Menurut Nicke, dana kompensasi yang sudah masuk kas perseroan ini merupakan wujud dukungan penuh pemerintah kepada Pertamina untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi, mendukung working capital serta memperbaiki rasio-rasio keuangan perusahaan.

Nicke menambahkan, apresiasi juga disampaikan atas dukungan penuh pemerintah kepada Pertamina dalam menjaga keberlangsungan pendistribusian BBM, termasuk menjalankan program BBM Satu Harga.

Nicke berkomitmen, Pertamina akan terus berupaya agar BBM bersubsidi secara optimal dikonsumsi oleh yang berhak. Upaya-upaya tersebut dilakukan lewat penggunaan teknologi informasi dalam memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time.

Upaya pertama yaitu lewat program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Hasilnya, semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, sehingga memudahkan monitoring dan pengawasan.

Kedua, Pertamina mengembangkan alert system yang mengirimkan exception signal yang dimonitor langsung oleh command center Pertamina dan ditindaklanjuti oleh tim di lapangan. Exception signal ini mengirimkan data transaksi tidak wajar, di antaranya pengisian solar di atas 200 liter untuk satu kendaraan bermotor pada hari yang sama, hingga pengisian BBM bersubsidi

dengan tidak memasukkan nopol kendaraan.

Sejak implementasi exception signal ini pada 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US\$200 juta atau Rp3,04 triliun.

Ketiga, mendorong kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya. Keempat, mendorong masyarakat mendaftarkan Program Subsidi Tepat via website untuk mengidentifikasi konsumen yang berhak dan memonitor konsumsi JBT Solar dan JBKP Peralite.

Di samping itu, Pertamina juga terus melakukan efisiensi biaya operasional, baik di tingkat Holding maupun Subholding. Sampai November 2023, realisasi program efisiensi biaya di Pertamina Group telah mencapai US\$984,17 juta atau Rp14,99 triliun. • dro

PLN Telah Bangun 624 SPKLU Dukong Ekosistem Kendaraan Listrik

JAKARTA (IM) - PT PLN (Persero) membangun 54 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) selama 2023 sehingga secara keseluruhan, PLN telah menghadirkan 624 SPKLU di 411 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN berkomitmen mendukung ekosistem kendaraan listrik dengan menyiapkan SPKLU yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut dia, meningkatnya jumlah SPKLU tersebut dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. "PLN terus melakukan transformasi untuk meningkatkan pelayanan

pelanggan khususnya mendukung akselerasi ekosistem EV (electric vehicle/kendaraan listrik). Selain dukungan infrastruktur charging station, berbagai fitur di PLN Mobile juga menyediakan berbagai layanan untuk kemudahan pengguna EV," kata Darmawan, melalui keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (4/1).

Selama 2023, PLN mencatat jumlah transaksi di SPKLU meningkat signifikan dengan total jumlah mencapai 119.600 kali transaksi. Jumlah itu meningkat sebanyak 404 persen dibandingkan 2022 sebanyak 29.627 kali transaksi.

PLN juga mencatat pertumbuhan ekosistem EV juga terlihat dari peningkatan jumlah konsumsi listrik di SPKLU. Pada 2023, to-

talnya mencapai 2.464.825 kilowatt hour (kWh) atau meningkat 564 persen dibandingkan 2022 sebesar 436.656 kWh.

"Peningkatan jumlah transaksi dan konsumsi listrik di SPKLU ini menjadi sinyal positif pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. Kami akan terus dorong agar ekosistem ini lebih maju, produktif di masa depan," ucapnya.

Animo masyarakat terhadap kendaraan listrik yang meningkat pada 2023 senada dengan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hingga Oktober 2023, terdapat 74.988 unit motor listrik dan 20.414 mobil listrik yang telah beroperasi di Indonesia.

"PLN siap mendukung

kebutuhan infrastruktur untuk pengisian daya kendaraan listrik, ke depan PLN akan terus menambah SPKLU sehingga sektor transportasi akan makin ramah lingkungan," ujar Darmawan.

Ia merinci bahwa saat ini khususnya di Jakarta Raya sudah ada 113 SPKLU yang terbesar di 43 titik. Sedangkan di Jawa Barat, 150 SPKLU yang tersebar di 125 titik. PLN juga sudah menyediakan empat SPKLU di Papua dan 25 SPKLU di Nusa Tenggara.

"Kami yakin, dengan SPKLU yang tersebar di Indonesia, khususnya untuk di daerah destinasi wisata, kami juga menyediakan SPKLU untuk bisa mendorong green tourism di Indonesia," tuturnya.

Pada capaian tersebut,

BPR SUPRA

PULAUINTAN
General Contractor

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

Rukun Raharja Akuisisi 8% Saham Blok Jabung

JAKARTA (IM) - PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) mengumumkan penyelesaian akuisisi 8% Participating Interest di Wilayah Kerja Jabung, Jambi. RAJA melalui anak usahanya yaitu PT Raharja Energi Tanjung Jabung (RETJ) dan PT GPI Jabung Indonesia melakukan penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal 29 Desember 2023.

Kesepakatan ini terjalinkan melalui Perjanjian Jual Beli Participating Interest Bersyarat yang ditandatangani bersama PT GPI Jabung Indonesia pada 7 Juni 2023 dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM pada tanggal 22 Desember 2023.

Pencapaian ini merupakan hasil dari penilaian RAJA terhadap potensi Wilayah Kerja Jabung yang diprediksi akan terus menghasilkan produksi Migas signifikan, dan berdasarkan WPNB pada tahun 2024 sendiri ditargetkan berproduksi sebesar 55.000 BOEPD.

Direktur Utama RAJA Djauhar Maulidi menyatakan, pengambilalihan ini merupakan langkah strategis untuk menambah dan memperkuat portofolio RAJA dalam Investasi

Hulu Migas di Indonesia. Dia meyakini bahwa kehadiran kami di Blok Jabung tidak hanya akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan tetapi juga memperkuat peluang kami dalam mengembangkan infrastruktur Migas dan alokasi Migas di masa depan.

"Kami percaya bahwa investasi ini akan menghasilkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham kami. Blok Jabung memiliki potensi produksi Migas yang menjanjikan, dan kehadiran kami di sana akan memperkuat posisi RAJA sebagai pemain di industri energi Indonesia," kata Djauhar, Kamis (4/1).

Kontribusi keuangan dari kepemilikan ini diharapkan memberikan peningkatan substansial dan dapat meningkatkan stabilitas keuangan Perseroan, yang nantinya dapat digunakan untuk reinvestasi dalam bisnis dan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Hal ini merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk terus meningkatkan shareholders value dan memenuhi komitmen untuk terus berinovasi dan berkontribusi pada kemajuan industri energi nasional yang sejalan dengan visi dan misi Perseroan. • pan

NFA Siapkan Rp28,7 T Serap Produksi Beras Dalam Negeri

JAKARTA (IM) - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menyiapkan dana penjaminan senilai Rp28,7 triliun yang akan diberikan kepada Bulog dan ID Food untuk salah satunya menyerap produksi beras dari panen raya 2024.

"Tapi ini bukan uang habis pakai melainkan convert diberikan kepada Bulog dan ID FOOD untuk melakukan off-take produksi dalam negeri," kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi saat mendampingi Presiden Jokowi mendistribusikan bantuan beras sebagaimana dikutip di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (4/1).

Arief menuturkan dana penjaminan untuk memastikan off-taker yang menjadi kendala oleh petani dan peternak. Sehingga, ia meminta para petani dan peternak untuk berfokus pada produksi saja dan BUMN di bidang pangan akan siap menyerap hasil produksi dengan harga yang bagus.

NFA bersama Perum Bulog, lanjutnya terus bersiap menyambut panen raya di 2024. Penyerapan produksi dalam negeri guna memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), ditegaskannya, menjadi prioritas demi ketahanan pangan nasional.

Hal itu seiring The United States Department of Agriculture (USDA) yang pada Desember 2023 lalu memproyeksikan total produksi beras global pada

2023/2024 akan menurun hampir 3,8 juta ton. Termasuk produksi beras Indonesia yang diproyeksikan menurun 500 ribu ton akibat terlambatnya musim penghujan.

"Kementerian Pertanian hari ini sedang bekerja keras untuk tanam. Bapak Presiden telah meminta kami untuk serap produksi dalam negeri. Jadi kita ingin 3 atau 4 bulan ke depan, beras yang kita distribusikan ini, kalau bisa sudah dari petani kita," ujar Arief.

Lebih lanjut, Arief turut mengapresiasi PT Pos Indonesia yang berperan sebagai salah satu transporter bantuan pangan beras. Ia mengatakan infrastruktur logistik yang dimiliki Pos Indonesia memang mumpuni dan mampu menjangkau ke seluruh Indonesia.

"PT Pos sebagai salah satu transporter bantuan pangan beras, tentunya ini melalui lelang. Jadi kita open bidding, kita lelang terbuka. Ini kurang lebih sekitar Rp1,5 triliun yang harus disiapkan oleh Bulog untuk mendistribusikan 6 bulan ke depan. Kalau menurut saya hari ini memang PT Pos yang paling layak karena infrastrukturnya mumpuni. Kemudian SDM (sumber daya manusia) dan bahkan punya motor sampai ke kelurahan-kelurahan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), yang ada di Indonesia," tambahnya. • dot